

# PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI PROVINSI BANTEN 2016

**Alim Sumantri**

Pemimpin Grup Pengembangan Strategis Bank BJB Syariah Kantor Pusat  
Mahasiswa EKIS Pasca Sarjana UIN SMH Banten

## **Abstrak**

Studi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perbankan syariah (BUS & UUS) dapat tumbuh dan berkembang di Provinsi Banten. Dengan potensi ekonomi dan potensi sosiologis yang dimilikinya, Provinsi Banten idealnya menjadi wilayah *market* potensial bagi perbankan syariah untuk mengembangkan bisnisnya. Hasil studi ini menunjukkan bahwa maka kinerja perbankan syariah di Provinsi Banten lebih baik dalam menyerap pasar di wilayahnya dibandingkan dengan rata-rata *market share* di wilayah provinsi lain. Kondisi tersebut tercermin dari *market share* asset perbankan syariah terhadap perbankan umum di Provinsi Banten pada tahun 2016 sebesar 5.5%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan *market share* secara nasional pada tahun yang sama sebesar 5.3%. sedangkan dari distribusi berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Banten, maka Kota Tangerang memberikan kontribusi paling besar dibandingkan Kota/Kabupaten lain dengan volume aset mencapai 3.586 milyar atau 40% dari total kinerja aset perbankan syariah seluruh Provinsi Banten. Sedangkan sebaran jaringan kantor bank perbankan syariah di banten pada tahun 2016, dari jumlah kantor bank syariah (BUS & UUS) secara nasional sebanyak 2201, jumlah kantor bank syariah yang berada di Provinsi Banten berjumlah 93 kantor atau 4.2% dari total kantor secara nasional, dengan komposisi terdiri dari KC berjumlah 19 kantor, KCP berjumlah 66 kantor dan KK berjumlah 8 kantor.

**Kata Kunci** : *Perbankan Syariah, Provinsi Banten, Market Share, Jaringan Kantor*

## **A. Pendahuluan**

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 dengan UU

No. 7 Tahun 1992 sebagai landasan hukumnya yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 1998. Sejak itu perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang terus menerus dengan laju pertumbuhan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi yang melarbelakngi dan beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Obsesi peningkatan *Market share* perbankan syariah terhadap Perbankan umum nasional sebesar 20% pada tahun 2020, namun lebih dari dua dekade sejak perbankan syariah berdiri baru dapat terealisasi 5.32% pada akhir tahun 2016, pada tahun 2016 terjadi lompatan pertumbuhan aset perbankan syariah semenjak konversinya BPD Aceh menjadi Bank Syariah bulan Agustus 2017.

Pertumbuhan Perbankan syariah di beberapa daerah di Indonesia bervariasi antara lain dipengaruhi dari kondisi ekonomi yang tercermin dari PDRB daerah dan ketersediaan jaringan perbankan syariah di wilayah tersebut, serta preferensi masyarakat daerah terhadap bank syariah.

Provinsi Banten merupakan daerah otonom yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, yang merupakan pemekaran dari sebelum Provinsi Jawa Barat. Sebagai provinsi yang masih relatif muda, Banten dikenal sebagai daerah dengan nilai-nilai religi yang kuat, hal itu tercermin dari visi yang dicanangkan Provinsi Banten yaitu Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa.

Sebagai Provinsi dengan jumlah mayoritas muslim sebesar 82% dari jumlah penduduk merupakan salah satu faktor preferensi tersendiri dan potensi *market* bagi perbankan syariah untuk mengembangkan bisnisnya di wilayah Provinsi Banten di samping faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. (Badan Pusat Statistik Provinsi Banten 2016).

OJK telah menyusun visi pengembangan perbankan syariah nasional yaitu “Mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas system keuangan seta berdaya saing tinggi” (Otoritas Jasa Keuangan 2015). Visi tersebut apabila diterjemahkan dalam skala yang lebih kecil adalah eksistensi perbankan syariah di Banten diharapkan mampu berkontribusi secara riil bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Provinsi Banten. Semakin pesat pertumbuhan perbankan syariah di Banten maka pertumbuhan dan pemertaan ekonomi di Banten

akan semakin baik.

## B. Pembahasan

### 1. Perbankan Umum di Provinsi Banten

Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 256.620.826 jiwa, dimana penduduk terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 47.026.402 jiwa, sementara yang paling sedikit penduduknya adalah Provinsi Papua Barat yaitu sebanyak 928.968 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk di Provinsi Banten sebanyak 11.955.243 jiwa.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 sebesar 4,79 persen, dimana Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 21,24 persen, sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur melambat 1,28 persen. Provinsi Banten mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5.37 persen.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah berkorelasi positif dengan kinerja keuangan perbankan khususnya pada indikator pertumbuhan simpanan dan kredit. Jika pada suatu daerah pertumbuhan ekonominya tinggi maka pertumbuhan simpanan dan kredit perbankannya akan mengikuti. (Bank BJB Syariah 2015)

Tabel 1  
Kinerja Keuangan Perbankan Umum di Provinsi Banten  
Periode 2014-2016

INDIKATOR KEUANGAN PERBANKAN		2014	2015	YoY	2016	YoY
1	Aset	140,871	148,012	5.07%	175,895	18.84%
2	DPK	121,613	129,632	6.59%	149,874	15.62%
	Giro	30,421	33,550	10.28%	42,538	26.79%
	Tabungan	42,634	45,808	7.44%	54,118	18.14%
	Deposito	48,558	50,273	3.53%	53,218	5.86%
3	Kredit	89,177	97,056	8.84%	112,602	16.02%
4	LDR	73.33%	74.87%		75.13%	
5	NPL	1.85%	2.12%		2.11%	

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Keuangan Daerah

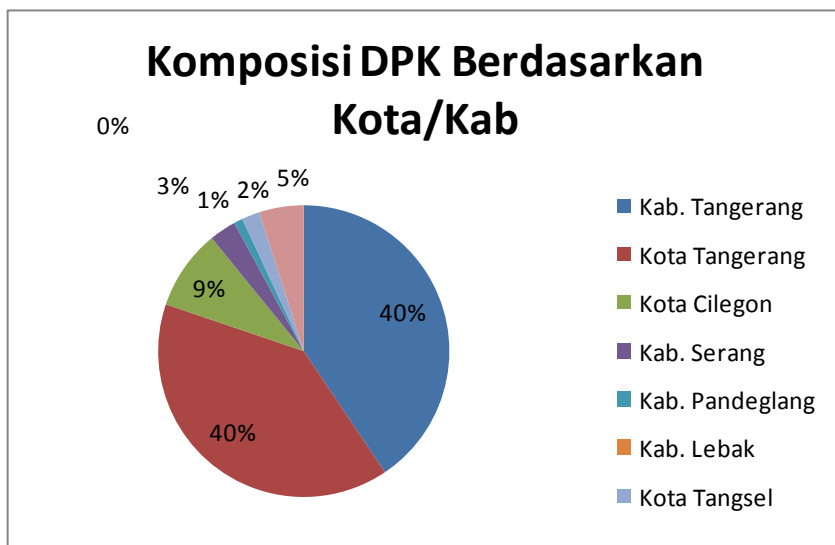
\* Data tidak termasuk BPR

Aset perbankan di Provinsi Banten dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir meningkat. Pada kuartal IV 2016 aset perbankan di Provinsi

Banten Mencapai 175.895 Milyar atau meningkat dari periode tahun sebelumnya (YoY) 18.84%, peningkatan tersebut lebih tinggi dibandingkan peningkatan tahun 2015 sebesar 5.07%. sedangkan dari sisi DPK secara volume yang terkumpul pada tahun 2016 sebesar 149,874 Miliar meningkat 15.62% dari tahun sebelumnya. Dari sisi komposisi DPK, pada tahun 2016 perbankan di Provinsi Banten dapat menghimpun tabungan sebesar 54.118 Miliar lebih besar daripada produk deposito dan giro, sedangkan dari sisi pertumbuhan, giro mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 26.79%.

Jika dilihat dari distribusi dan sebaran pencapaian kinerja keuangan perbankan umum berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Banten, sebagian besar DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Banten berdasarkan Kota/Kabupaten, maka DPK dari Kabupaten Tangerang menyumbang tertinggi dengan volume mencapai Rp. 61,58 Triliun atau 41,09% dari total DPK di Banten. Kota Tangerang memberikan kontribusi DPK terbesar kedua dengan volume mencapai 59 Triliun atau sebesar 39.6% dari total DPK di Banten, selanjutnya disusul oleh Kota Cilegon dengan volume DPK sebesar 13.08 Triliun atau sebesar 8.73% dari DPK di Banten. (Bank Indonesia 2017).

Gambar 1  
Kinerja DPK Perbankan Umum Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Banten 2016



Sedangkan dari sisi kredit, secara volume yang tersalurkan pada tahun 2016 sebesar 112,602 Miliar atau tumbuh 16.02% dari periode yang sama tahun sebelumnya 2015 (YoY) sebesar Rp. 97.056 Miliar, pertumbuhan kredit pada tahun 2016 lebih besar dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 8.84, kondisi ini juga mencerminkan normalisasi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional termasuk di Provinsi Banten pada tahun 2016. Strategi mayoritas bank yang melakukan konsolidasi pada dua tahun sebelumnya maka pada tahun 2016 ini mulai melakukan ekspansi kredit terbatas dan namun tetap *prudent*.

Fungsi intermediasi perbankan di Provinsi belum sepenuhnya optimal, jika dilihat dari LDR (*Loan to Deposit Ratio*) 3 (tiga) tahun terakhir yang berada masing-masing sebesar 73.33%, 74.87% dan 75.13%, hal ini menunjukkan bahwa DPK yang terkumpul tidak sepenuhnya terutilisasi secara optimal dalam bentuk penyaluran kredit. Belum optimalnya fungsi intermediasi perbankan di Provinsi Banten perlu menjadi kajian lebih lanjut dan perhatian *stakeholders* supaya perbankan di Provinsi Banten tidak semata-mata hanya melakukan bisnis bank pada sisi penghimpunan dana namun tidak imbangi dari sisi penyaluran kredit baik ke sector riil maupun konsumsi, atau dengan kata lain sebagian bank melakukan penghimpunan dana di Provinsi Banten sedangkan penyaluran kredit dilakukan di wilayah lain. Harapannya keseimbangan fungsi intermediasi bank mampu mendorong pertumbuhan sector produktif dan konsumtif di Provinsi Banten sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Banten.

Dari sisi risiko kredit, rasio kredit bermasalah yang tercermin dari rasio NPL (*Non Performing Loan*), pada tahun 2016 kualitas kredit di Provinsi Banten pada rasio NPL 2.11% sedikit membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2.12% sejalan dengan pertumbuhan kredit, disamping juga mulai membaiknya pertumbuhan ekonomi serta mulai membaiknya sector riil dan daya beli konsumsi masyarakat sangat mempengaruhi membaiknya kualitas kredit perbankan di Provinsi Banten. Namun demikian dibandingkan dengan NPL tahun 2014, risiko kredit perbankan di Provinsi Banten meningkat, kredit macet yang menghantui bisnis perbankan akibat dari perlambatan ekonomi masih dirasakan oleh dunia perbankan. Upaya-upaya bank melakukan *recovery* kredit

bermasalah terus dilakukan dalam upaya memperbaiki tingkat rasio NPL perbankan.

## 2. Perbankan Syariah di Provinsi Banten

Tabel 2  
Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (BUS&UUS)  
di Provinsi Banten Periode 2014-2016

INDIKATOR KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH		2014	2015	YoY	2016	YoY
1	Aset	8,101	8,178	0.95%	9,652	18.02%
2	DPK	5,444	6,051	11.16%	7,374	21.86%
3	Pembiayaan	5,791	5,718	-1.27%	7,042	23.15%
4	FDR	106.38%	94.49%		95.49%	
5	NPF	5.38%	4.58%		3.90%	

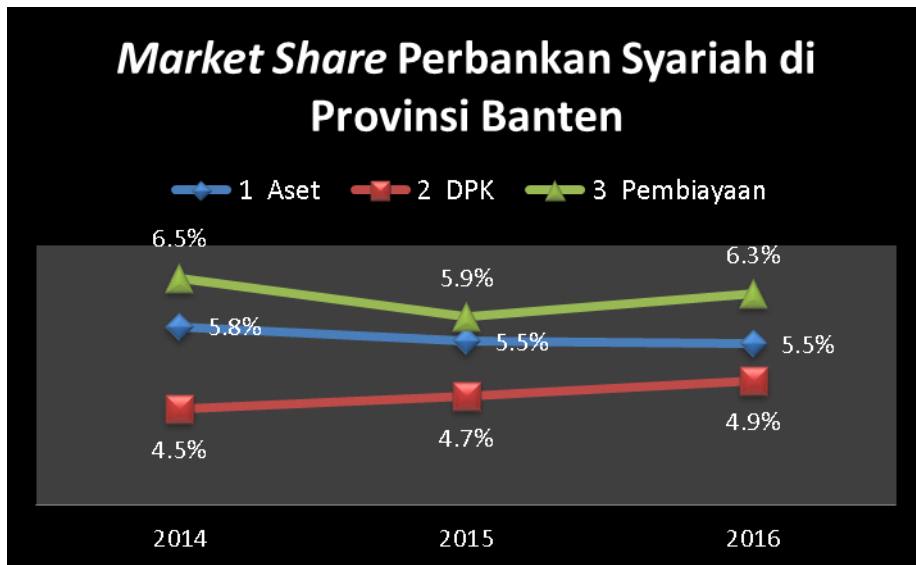
Pertumbuhan perbankan syariah baik Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Provinsi Banten dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif meliputi komponen aset, dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan.

Pada tahun 2014, perlambatan ekonomi domestik dan kondisi likuiditas perbankan yang ketat mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah di Banten, kondisi tersebut tercermin pada pertumbuhan semua indikator keuangan baik aset yang hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0.95%, DPK sebesar 11.16% dan Pembiayaan yang mengalami pertumbuhan negative -1.27%. peningkatan DPK yang lebih tinggi dari pada pembiayaan pada tahun 2015 dilakukan perbankan syariah dalam rangka memperbaiki kinerja likuiditasnya yang tercermin dari rasio FDR yang pada tahun 2014 sebesar 106.38% menjadi lebih baik sebesar 94.49%. Pada tahun 2016, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi yang tercermin dari perbaikan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan mulai pulihnya kembali sebagai harga-harga komoditas, industri perbankan nasional termasuk perbankan umum dan perbankan syariah di Provinsi Banten mengalami perbaikan kinerja pertumbuhan. Kondisi tersebut terefleksi dari pertumbuhan aset perbankan syariah di Provinsi Banten pada tahun 2016 mencapai 18.02% secara *year on year (YoY)* jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0.95%. Demikian pula dengan kinerja DPK dan Pembiayaan yang pada tahun 2016 mengalami

pertumbuhan tertinggi selama 3 tahun terakhir masing-masing sebesar 21.86% dan 23.15% dengan tingkat fungsi intermediasi yang baik yaitu tercermin dari rasio FDR sebesar 95.29%.

Gambar 2

Perkembangan *Market share* Perbankan Syariah di Provinsi Banten Periode 2014-2016

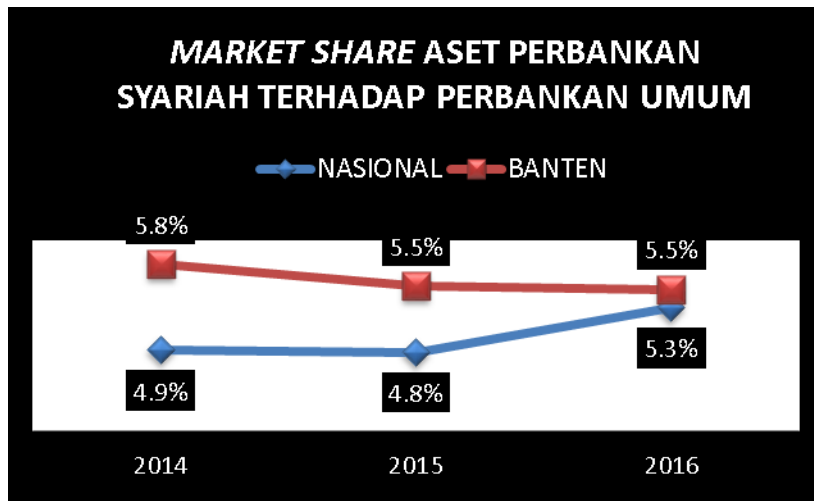


Aset perbankan syariah di Provinsi Banten pada tahun 2014 sebesar 8.1 triliun, realisasi tersebut berhasil menjadikan *market share* perbankan syariah di Provinsi Banten mencapai sebesar 5.5%, sejalan dengan penurunan kinerja perbankan syariah pada tahun 2015, maka *market share* asset perbankan syariah terhadap perbankan umum di Provinsi Banten mengalami penurunan sebesar 5.5%, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perbankan konvensional lebih tinggi dibandingkan perbankan syariah pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 sejalan dengan perbaikan kinerja perbankan syariah mencatatkan *market share* terhadap perbankan umum di Provinsi Banten meningkat kembali menjadi 5.5%.

Adapun dari sisi pembiayaan, perbankan syariah di Provinsi Banten mencatatkan *market share* lebih tinggi dibandingkan dengan *market share* asset dan DPK, yaitu berturut-turut dari tahun 2014-2016 adalah sebesar 6.5% menurun pada tahun 2015 sebesar 5.9% dan *rebound* kembali pada tahun 2016 menjadi 6.3%. sedangkan dari sisi DPK *market share* perbankan syariah terhadap perbankan umum di Provinsi Banten lebih kecil dibandingkan asset dan pembiayaan, kondisi ini mengindikasikan bahwa

kemampuan perbankan syariah di Provinsi Banten dalam menyerap DPK lebih rendah dibandingkan kemampuan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan.

Gambar 3  
Perbandingan *Market share* Perbankan Syariah Tahun 2016  
Provinsi Banten Vs Nasional



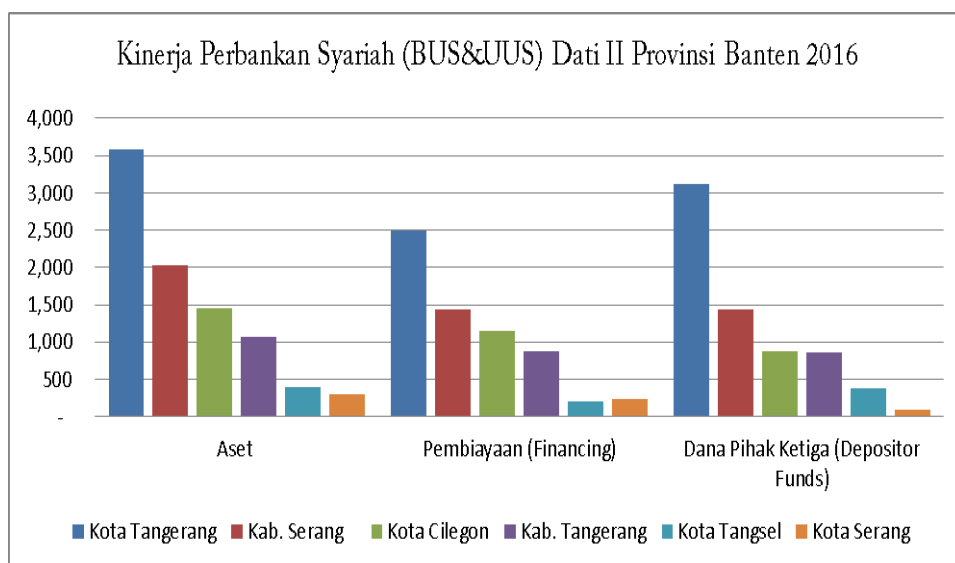
Jika dibandingkan dengan kinerja perbankan syariah secara nasional, maka kinerja perbankan syariah di Provinsi Banten lebih baik dalam menyerap pasar di wilayahnya, kondisi tersebut tercermin dari *market share* aset perbankan syariah terhadap perbankan umum di Provinsi Banten yang lebih tinggi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2014, *market share* Banten sebesar 5.8% lebih tinggi dibandingkan dengan nasional sebesar 4.9%, namun seiring penurunan pertumbuhan pada tahun 2015, *market share* Banten menurun menjadi 5.5%, namun demikian masih lebih tinggi dibandingkan Nasional dengan gap sebesar 0.7%. setelah aksi korporasinya Bank Aceh melakukan konversi menjadi bank umum syariah pada tahun 2016, maka *market share* perbankan syariah nasional meningkat menjadi 5.3%, sedangkan *market share* Banten masih tetap dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5.5% sehingga gapnya menjadi lebih tipis sebesar 0.2%.

Tabel dan penjelasan diatas menunjukkan bahwa secara *market* masyarakat Banten mempunyai preferensi dan minat yang kuat dengan perbankan dengan system syariah, hal ini tidak lepas dari mayoritas

penduduk muslim Banten dan tingkat religiusitas lingkungan di Banten. Namun demikian tabel diatas juga menunjukkan bahwa pertumbuhan kinerja perbankan syariah di Provinsi Banten selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dalam mengakuisisi nasabah baik pembiayaan maupun DPK dibandingkan perbankan syariah di wilayah lain di Indonesia.

Tabel 3  
Kinerja Perbankan Syariah (BUS&UUS) Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2016

Propinsi	Kota/Kabupaten	Aset	Pembiayaan (Financing)	Dana Pihak Ketiga (Depositor Funds)	FDR
Banten	Kota Tangerang	3,582	2,501	3,114	80.33%
	Kab. Serang	2,026	1,432	1,433	99.94%
	Kota Cilegon	1,451	1,152	874	131.90%
	Kab. Tangerang	1,072	882	863	102.18%
	Kota Tangsel	401	206	381	54.04%
	Kota Serang	303	234	86	272.05%



Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK

Jika dilihat dari kinerja perbankan syariah pada tahun 2016 berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Banten (belum termasuk Kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak) menunjukkan bahwa dari sisi aset, pembiayaan dan DPK, Kota Tangerang memberikan kontribusi paling

besar dibandingkan Kota/Kabupaten lain dengan volume aset mencapai 3.586 miliar, jumlah tersebut didorong dari perolehan DPK sebesar 3.114 miliar sedangkan pembiayaan yang disalurkan sebesar 2.501 miliar sehingga FDR (*Financing to Deposit Ratio*) mencapai 80.33%, sedangkan aset terkecil adalah Kota Serang dengan capaian volume aset sebesar 303 miliar dengan volume pembiayaan sebesar 234 miliar dan DPK hanya 86 miliar, sehingga FDR perbankan syariah kota Serang terlampaui tinggi mencapai sebesar 272.05%. Rendahnya pencapaian perbankan syariah Kota Serang khususnya dari sisi penghimpunan dana yang tercermin dari perolehan DPK yang hanya Rp. 86 miliar perlu dilakukan kajian lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagai ibukota Provinsi Banten dan kota madani dengan basis religius islam, perbankan syariah di Kota Serang belum mampu menyerap dan mencerminkan faktor sosiologis masyarakat Kota Serang. Bahkan jika dibandingkan perolehan DPK perbankan umum (lihat gambar 1) tidak menunjukkan data yang linier dimana Kota Serang masih lebih baik dibandingkan dengan Kota Tangsel.

### **3. Jaringan Kantor**

Perkembangan kinerja suatu perbankan di suatu daerah salah satu faktor pendorongnya adalah dipegaruhi oleh jumlah *distribution channel* bank yang berada di daerah tersebut baik berupa jaringan kantor maupun pelayanan kas elektronik seperti ATM. Jaringan kantor bank yang melakukan aktifitas operasional bank secara besaran cakupan kegiatan berturut-turut terdiri dari Kantor Cabang (KC) yaitu kantor bank yang bertanggungjawab kepada kantor pusat meliputi kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa lainnya, Kantor Cabang Pembantu (KCP) yaitu kantor bank yang bertanggungjawab kepada kantor cabang meliputi kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa lainnya serta Kantor Kas (KK) kantor bank yang kegiatan usahanya membantu KC atau KCP induknya kecuali penyaluran dana. sedangkan Kegiatan Pelayanan Kas (KPK) adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah bank terdiri dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Payment Point (PP), Kas Keliling. (Bank Indonesia 24 Desember 2013)

Jaringan kantor perbankan syariah baik BUS dan UUS secara nasional tiga tahun terakhir mengalami penurunan jumlah kantor. Pada tahun 2014, perbankan syariah mempunyai jaringan kantor 2.1483 kantor

yang meliputi seluruh jenis kantor, menurun menjadi 2.301 pada tahun 2015 dengan jumlah penutupan kantor terbanyak pada KCP dari 1.651 menjadi 1.469 atau terdapat 182 KCP yang tutup sepanjang tahun 2015, kondisi tersebut tidak terlepas dari dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga industri perbankan syariah melakukan konsolidasi bisnis dengan melakukan efisiensi termasuk adalah melakukan penutupan kantor operasional yang dinilai tidak produktif. Kondisi tersebut juga *inline* terhadap kinerja perbankan syariah pada tahun 2015 yang mengalami perlambatan pertumbuhan secara signifikan (lihat tabel...). Strategi konsolidasi pengembangan jaringan kantor berlanjut pada tahun 2016, jumlah kantor mengalami penurunan jumlah dengan menjadi 2.201 kantor dari tahun sebelumnya berjumlah 2.301 kantor atau terjadi penutupan sebesar 100 kantor, penutupan terbanyak terjadi pada KCP berjumlah 127 kantor.

Tabel 4  
Jumlah Kantor Bank Syariah (BUS&UUS) dan Perkembangannya  
Periode 2014-2016

JARINGAN KANTOR PERBANKAN SYARIAH		2014	2015	2016
1	Jumlah Bank	197	197	200
2	Jumlah Kantor	2,483	2,301	2,201
	KC	585	588	622
	KCP	1,651	1,469	1,342
	KK	247	244	237
3	ATM	3,482	3,716	3,259

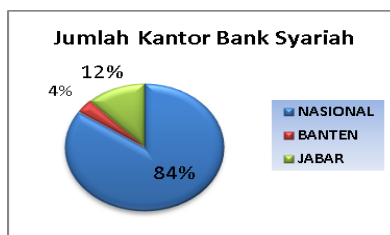
*Sumber : Statistik Perbankan Syariah*

Sebaran jaringan kantor bank perbankan syariah di Banten pada tahun 2016, dari jumlah kantor bank syariah (BUS & UUS) secara nasional sebanyak 2201, jumlah kantor bank syariah yang berada di Provinsi Banten hanya 93 kantor atau 4.2% dari total kantor secara nasional, dengan komposisi terdiri dari KC berjumlah 19 kantor, KCP berjumlah 66 kantor dan KK berjumlah 8 kantor. Jumlah tersebut lebih kecil dari kantor bank syariah yang berada di Provinsi Jabar dengan jumlah 314 kantor. Dibandingkan dengan Provinsi tetangga Jawa Barat, jaringan kantor di Provinsi Banten hanya 30% dari jumlah kantor yang di Jabar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan industry perbankan syariah di Wilayah Banten belum semenarik dibandingkan dengan Wilayah Jabar padahal di sisi lain *market share* perbankan syariah dibandingkan dengan

perbankan umum di Provinsi Banten lebih tinggi dibandingkan dengan *Market share* secara nasional.

Tabel 5  
Perbandingan Sebaran Jaringan Kantor Bank Syariah (BUS&UUS)  
Tahun 2016  
Antara Nasional, Banten dan Jawa Barat

SEBARAN JARINGAN KANTOR BANK	2016		
	NASIONAL	BANTEN	JABAR
Jumlah Kantor	2,201	93	314
KC	622	19	61
KCP	1,342	66	225
KK	237	8	28



### C. Kesimpulan

1. Perbankan syariah di Provinsi Banten lebih baik dalam menyerap pasar di wilayahnya dibandingkan dengan rata-rata *market share* di wilayah provinsi lain. Kondisi tersebut tercermin dari *market share* asset perbankan syariah terhadap perbankan umum di Provinsi Banten pada tahun 2016 sebesar 5.5%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan *market share* secara nasional pada tahun yang sama sebesar 5.3%
2. Distribusi berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Banten, maka Kota Tangerang memberikan kontribusi paling besar dibandingkan Kota/Kabupaten lain dengan volume aset mencapai 3.586 milyar atau 40% dari total kinerja aset perbankan syariah seluruh Provinsi Banten.
3. Sebaran jaringan kantor bank perbankan syariah di banten pada tahun 2016, dari jumlah kantor bank syariah (BUS & UUS) secara nasional sebanyak 2201, jumlah kantor bank syariah yang berada di Provinsi Banten berjumlah 93 kantor atau 4.2% dari total kantor secara nasional, dengan komposisi terdiri dari KC berjumlah 19 kantor, KCP berjumlah 66 kantor dan KK berjumlah 8 kantor. Kondisi tersebut juga menunjukkan produktifitas setiap kantor di banten lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata produktifitas setiap kantor secara nasional, hal ini tercermin dari jumlah *share* kantor 4.2% menghasilkan *market share* 5.3% secara nasional.
4. Perlunya kajian lebih dalam terkait rendahnya pencapaian perbankan

syariah Kota Serang khususnya dari sisi penghimpunan dana yang tercermin dari perolehan simpanan yang hanya Rp. 86 miliar, sebagai ibukota Provinsi Banten dan kota madani dengan basis religius islam, perbankan syariah di Kota Serang belum mampu menyerap dan mencerminkan faktor sosiologis masyarakat Kota Serang.

### DAFTAR PUSATAKA

- Bank Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Banten Februari 2017. Serang: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, 2017.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Jakarta: Bank Indonesia, 24 Desember 2013.
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Indonesia. Jakarta : OJK, 2017
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah. Jakarta : OJK, 2017
- Bank BJB Syariah. *Kajian Mapping Potensi*. Working Papper, Bandung: Divisi Perencanaan Strategis Bank BJB Syariah, 2015.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. *Banten Dalam Angka 2016*. Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, 2015.